

Article Informations

Corresponding Email:

yaqinsampurnanurullahakbar@gmail.com

Received: 10/02/2025; Accepted:

11/02/2025; Published: 30/06/2025

KEBIJAKAN ASYLUM AND MIGRATION MANAGEMENT REGULATION (AMMR) UNI EROPA DALAM MENCEGAH MIGRASI ILEGAL DI JERMAN TAHUN 2023-2024

Yaqin Sampurna Nurullah Akbar¹⁾, Yusep Ginanjar²⁾, Anggun Dwi

Panorama³⁾

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Migrasi ilegal telah menjadi isu global yang kompleks, terutama di Uni Eropa, dengan Jerman sebagai salah satu negara tujuan utama. Skripsi ini menganalisis implementasi kebijakan Asylum and Migration Management Regulation (AMMR) Uni Eropa dalam mencegah migrasi ilegal di Jerman pada tahun 2023-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengkaji efektivitas kebijakan AMMR dalam mengelola migrasi ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AMMR berhasil memperkuat kontrol perbatasan, mempercepat proses suaka, dan meningkatkan solidaritas antar negara anggota Uni Eropa. Namun, tantangan tetap ada dalam menjaga keseimbangan antara efektivitas kebijakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini menyimpulkan bahwa AMMR merupakan langkah penting dalam reformasi kebijakan migrasi Uni Eropa, meskipun masih diperlukan penyesuaian untuk memastikan keadilan dan perlindungan HAM.

Kata Kunci: Migrasi Ilegal, Kebijakan AMMR, Uni Eropa, Jerman, Hak Asasi Manusia.

Abstract

Illegal migration has become a complex global issue, particularly within the European Union, with Germany being one of the primary destination countries. This thesis analyzes the implementation of the European Union's Asylum and Migration Management Regulation (AMMR) in preventing illegal migration in Germany during 2023-2024. The research employs a qualitative approach using a literature review method to assess the effectiveness of AMMR policies in managing illegal migration. The findings indicate that AMMR has successfully strengthened border control, accelerated asylum procedures, and enhanced solidarity among EU member states. However, challenges remain in maintaining a balance between policy effectiveness and the protection of human rights. The study concludes that AMMR represents a significant

step in the reform of EU migration policies, although further adjustments are necessary to ensure fairness and human rights protection.

Keywords: *Illegal Migration, AMMR Policy, European Union, Germany, Human Rights.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Migrasi internasional telah berkembang menjadi isu global yang kompleks dengan implikasi signifikan terhadap kedaulatan, stabilitas, dan keamanan negara-negara di seluruh dunia. Uni Eropa (UE), sebagai salah satu wilayah dengan arus migrasi tertinggi, menghadapi tantangan besar dalam mengelola migrasi ilegal, terutama setelah krisis migrasi 2015 yang dipicu oleh konflik berkepanjangan di Timur Tengah dan Afrika. Lonjakan migrasi ini menguji ketahanan sistem suaka yang ada, memperlihatkan kelemahan dalam pengawasan perbatasan, dan mengguncang prinsip solidaritas antar negara anggota Uni Eropa.

Jerman, sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Uni Eropa dan kebijakan migrasi yang relatif terbuka, menjadi tujuan utama bagi para migran, baik yang datang secara legal maupun ilegal. Stabilitas ekonomi yang kuat, sistem kesejahteraan sosial yang mapan, serta komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM) menjadikan Jerman sebagai negara yang menarik bagi migran yang mencari kehidupan yang lebih baik atau melarikan diri dari konflik. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tekanan yang signifikan pada infrastruktur sosial, ekonomi, dan keamanan negara tersebut. Pada tahun 2023, jumlah imigran ilegal di Jerman mencapai 127.549 orang, yang memperparah tantangan dalam hal integrasi sosial, beban layanan publik, serta meningkatnya kekhawatiran terkait keamanan nasional.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Uni Eropa mengeluarkan kebijakan Asylum and Migration Management Regulation (AMMR) pada Desember 2023. Kebijakan ini dirancang untuk mengatasi kelemahan dalam sistem migrasi Uni Eropa dengan memperkuat pengawasan perbatasan, mempercepat proses suaka, meningkatkan solidaritas antar negara anggota, serta memperluas kerja sama dengan negara ketiga. AMMR bertujuan untuk menciptakan pendekatan yang lebih terkoordinasi dan efektif dalam pengelolaan migrasi di seluruh wilayah Uni Eropa.

Meskipun kebijakan ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan migrasi ilegal, implementasi AMMR memicu perdebatan terkait efektivitas dan kesesuaiannya dengan standar hak asasi manusia internasional. Di satu sisi, regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan migrasi, namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat mengancam hak-hak pencari suaka, khususnya terkait prinsip non-refoulement— prinsip yang melarang pengembalian pencari suaka ke negara asal jika mereka berisiko mengalami penganiayaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan AMMR dalam mencegah migrasi ilegal ke Jerman pada tahun 2023-2024. Melalui evaluasi terhadap penguatan pengelolaan perbatasan, efisiensi proses suaka, solidaritas antar negara anggota, dan kerja sama internasional dengan negara asal atau transit migran, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap diskusi yang lebih luas mengenai reformasi kebijakan migrasi Uni Eropa. Selain itu, studi ini juga mengeksplorasi bagaimana implementasi AMMR di Jerman mampu menyeimbangkan antara pengendalian migrasi dengan perlindungan hak asasi manusia, serta mengungkap keberhasilan dan keterbatasan kebijakan ini dalam menangani migrasi ilegal. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan AMMR dalam mengelola migrasi ilegal di Jerman.

Kebijakan Migrasi Uni Eropa

Kebijakan migrasi Uni Eropa telah mengalami evolusi dari waktu ke waktu. Sebelum AMMR, Uni Eropa mengandalkan Common European Asylum System (CEAS) sebagai kerangka hukum untuk mengatur suaka dan migrasi. Namun, CEAS dianggap tidak efektif dalam menangani krisis migrasi 2015, yang memicu reformasi kebijakan migrasi. AMMR merupakan hasil dari reformasi tersebut, dengan fokus pada empat pilar utama: penguatan perbatasan, prosedur suaka yang cepat, solidaritas antar negara anggota, dan kerja sama dengan negara ketiga.

Migrasi Ilegal di Jerman

Jerman memiliki sejarah panjang sebagai negara tujuan migran, baik legal maupun ilegal. Krisis migrasi 2015 dan perang Rusia-Ukraina 2022

memperburuk situasi migrasi ilegal di Jerman. Faktor pendorong migrasi ilegal meliputi ketidakstabilan politik, kemiskinan, dan perubahan iklim di negara asal, sementara faktor penarik meliputi kesempatan ekonomi, sistem pendidikan, dan kebijakan suaka yang relatif terbuka di Jerman.

Teori Liberalisme dan Kerjasama Internasional

Penelitian ini menggunakan pendekatan liberalisme dalam hubungan internasional, yang menekankan pentingnya kerjasama internasional dan institusi multilateral dalam menyelesaikan masalah global seperti migrasi ilegal. Menurut Moravcsik, perilaku negara dalam politik internasional dipengaruhi oleh preferensi domestik dan kerjasama antarnegara. Keohane juga menekankan peran institusi internasional dalam memfasilitasi kerjasama dan mengurangi ketidakpastian dalam kebijakan migrasi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fenomena yang terjadi, dalam hal ini implementasi kebijakan AMMR di Jerman.

Data dikumpulkan melalui studi literatur, termasuk dokumen resmi Uni Eropa, laporan pemerintah Jerman, artikel jurnal, dan berita terkait migrasi. Peneliti juga menggunakan teknik Internet Based Research dan Document Based Research untuk mengumpulkan data sekunder.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan. Penyajian data dilakukan dengan mengorganisir data dalam bentuk tabel dan narasi. Kesimpulan ditarik berdasarkan bukti yang valid dan konsisten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan AMMR di Jerman

Kebijakan Asylum and Migration Management Regulation (AMMR) Uni Eropa diimplementasikan melalui empat pilar utama:

1. Memperkuat Pengelolaan Perbatasan:

Jerman meningkatkan kontrol perbatasan dengan negara tetangga seperti Polandia dan Republik Ceko. Sistem screening yang ketat dan penggunaan database Eurodac membantu mengidentifikasi dan melacak migran ilegal.

2. Memperkuat Sistem Suaka dan Perlindungan:

Prosedur suaka dipercepat dengan batas waktu yang jelas, sementara hak-hak dasar pencari suaka tetap dijamin. Jerman juga menerapkan aturan ketat untuk mencegah penyalahgunaan sistem suaka.

3. Meningkatkan Solidaritas dan Tanggung Jawab:

AMMR memperkenalkan kerangka solidaritas permanen, di mana negara anggota dapat memilih antara relokasi pencari suaka, kontribusi keuangan, atau bantuan operasional. Jerman mendorong negara-negara seperti Polandia dan Hongaria untuk berpartisipasi lebih aktif.

4. Meningkatkan Kerjasama dengan Negara Ketiga:

Jerman bekerja sama dengan negara asal dan transit migran untuk mencegah keberangkatan ilegal, memerangi penyelundupan manusia, dan memfasilitasi pengembalian migran yang tidak memenuhi syarat suaka.

Dampak Kebijakan AMMR

Kebijakan AMMR berhasil mengurangi arus migrasi ilegal melalui kontrol perbatasan yang diperkuat dan prosedur suaka yang lebih cepat. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan, seperti risiko pelanggaran HAM dalam proses screening dan deportasi. Selain itu, resistensi dari beberapa negara anggota Uni Eropa menghambat implementasi mekanisme solidaritas.

Tantangan dan Kritik

Meskipun AMMR dianggap sebagai langkah maju dalam reformasi kebijakan migrasi, kebijakan ini menuai kritik dari organisasi HAM seperti Amnesty International. Kritik utama terkait dengan potensi pelanggaran prinsip non-refoulement dan perlakuan tidak manusiawi terhadap migran. Selain itu, kebijakan ini dianggap terlalu represif oleh sebagian masyarakat Jerman, yang mengkhawatirkan dampaknya terhadap integrasi sosial dan keamanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi kebijakan AMMR oleh Uni Eropa menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan migrasi ilegal di Jerman. Kebijakan ini berhasil memperkuat kontrol perbatasan, mempercepat prosedur suaka, dan meningkatkan solidaritas antar negara anggota. Namun, tantangan tetap ada dalam menjaga keseimbangan antara efektivitas kebijakan dan perlindungan HAM. Kebijakan AMMR perlu terus disesuaikan untuk memastikan keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak migran.

Saran

1. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Proses suaka yang dipercepat harus disertai dengan transparansi dan akuntabilitas untuk menghindari kesalahan keputusan.
2. **Solidaritas Antar Negara Anggota:** Jerman harus mendorong solidaritas yang lebih besar dari negara anggota Uni Eropa lainnya dalam berbagi tanggung jawab migrasi.
3. **Perluasan Jalur Migrasi Legal:** Uni Eropa dan Jerman perlu memperluas jalur migrasi legal untuk mengurangi tekanan migrasi ilegal.
4. **Perlindungan HAM:** Kerja sama dengan negara ketiga harus dilakukan dengan memastikan perlindungan HAM bagi migran yang dipulangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2023). EU migration pact agreement will lead to a surge in suffering. <https://www.amnesty.org>
- Bundespolizei. (2023). Feststellungen von unerlaubten Einreisen durch die Bundespolizei. <https://www.bundespolizei.de>
- European Commission. (2020). Pact on Migration and Asylum. https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum_en
- Moravcsik, A. (1997). Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics. *International Organization*, 51(4), 513-553.